

Tersedia online di: <http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkpi>

e-mail: jkpi.puslitbangkan@gmail.com

JURNAL KEBIJAKAN PERIKANAN INDONESIA

Volume 17 Nomor 2 November 2025

p-ISSN: 1979-6366

e-ISSN: 2502-6550

Akreditasi Ditjen DIKTIRISTEK Nomor: 10/C/C3/DT.05.00/2025



FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGKAPAN IKAN TERUKUR DI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN, PACITAN, JAWA TIMUR

FACTORS INFLUENCING THE IMPLEMENTATION OF QUOTA-BASED FISHING POLICY AT TAMPERAN COASTAL FISHING PORT, PACITAN, EAST JAVA

**Prasetyo Catur Nugroho¹, Agus Suherman^{1*}, Bogi Budi Jayanto¹, Yayan Hernuryadin², Wawi Suroso², dan
Faik Kurohman¹**

¹Departemen Perikanan Tangkap Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro

²Ditjen Penempatan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Teregistrasi I tanggal: 15 Oktober 2025; Diterima setelah perbaikan tanggal: 24 Nopember 2025;

Disetujui terbit tanggal: 27 Nopember 2025

ABSTRAK

Penangkapan ikan terukur (PIT) merupakan kebijakan pemerintah dalam menjaga keberlanjutan sumber daya ikan melalui penetapan zona penangkapan ikan dan kuota hasil tangkapan ikan. PPP Tamperan-Pacitan merupakan pelabuhan perikanan yang aktivitas pendaratannya paling tinggi di Selatan Jawa Timur dan berada di Zona IV PIT. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor keberhasilan implementasi PIT, menilai persepsi dan pengalaman pelaku perikanan, serta menguji hubungan keduanya. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan *purposive sampling*, melibatkan 33 responden dari pemilik kapal, pengurus, petugas pelabuhan, dan pengawas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi PIT meliputi komunikasi, sarana dan prasarana, sikap pelaksana, struktur pengelola, dan pelaksanaan kebijakan, yang secara umum dinilai baik oleh responden. Selanjutnya, persepsi pelaku perikanan terhadap kebijakan PIT cenderung positif, sementara pengalaman mereka berada pada kategori moderat, meskipun masih terdapat kendala berupa keterbatasan fasilitas, modal, dan literasi digital. Hasil uji Chi-Square menunjukkan nilai Pearson sebesar 57,433 (sig. 0,000 < 0,05) dengan koefisien kontingensi 0,66, yang berarti terdapat hubungan kuat dan signifikan antara persepsi dan pengalaman pelaku perikanan terhadap pelaksanaan kebijakan PIT.

Kata Kunci: Penangkapan Ikan Terukur; Zona; Kuota; Pelabuhan Perikanan; PPP Tamperan

ABSTRACT

Quota-Based Fishing (QBF) is a government policy that aims to maintain the sustainability of fish resources by determining fishing zones and quotas. PPP Tamperan-Pacitan is a fishing port with the highest landing activity in South East Java and is located in Zone IV PIT. This study aims to analyze the factors influencing the successful implementation of QBF, assess the perceptions and experiences of fishery actors, and examine their relationship. A quantitative descriptive method was employed, utilizing purposive sampling, with 33 respondents comprising vessel owners, managers, port officers, and field supervisors. The results show that the factors influencing the successful implementation of QBF include communication, infrastructure, implementers' attitudes, management structure, and policy execution, all of which were generally rated as good by respondents. Furthermore, the perception of fisheries actors toward the QBF policy tends to be positive. At the same time, their experiences fall into the moderate category, although challenges remain, such as limited facilities, capital, and digital

Korespondensi penulis:

e-mail: lpgsuherman2@gmail.com

literacy. The Chi-Square test yielded a Pearson value of 57.433 ($p < 0.05$) with a contingency coefficient of 0.66, indicating a strong and significant relationship between the perceptions and experiences of fisheries actors regarding the implementation of the QBF policy.

Keywords: Quota-based fishing policy; Zone; Quota; Fishing Ports; CFP Tamperan

PENDAHULUAN

Perikanan tangkap merupakan salah satu subsektor strategis yang menopang ketahanan pangan dan perekonomian nasional Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP, 2024), kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDB mencapai 2,52% dengan tren produksi yang terus meningkat setiap tahunnya. Namun, peningkatan aktivitas penangkapan ikan juga menimbulkan tekanan terhadap sumber daya perikanan dan ekosistem laut. Laporan FAO (2023) menyebutkan bahwa lebih dari 35% stok ikan dunia telah dieksploitasi secara berlebihan (*overfished*), termasuk di kawasan perairan Indonesia bagian timur. Kondisi ini menuntut adanya pengelolaan yang lebih terukur dan berkelanjutan.

Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur. Kebijakan ini menandai perubahan paradigma dari *open access fisheries* menuju sistem pengelolaan berbasis kuota dan zonasi. Tujuan utama PIT adalah menjaga keberlanjutan sumber daya ikan, meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, serta memperkuat kontribusi sektor perikanan terhadap penerimaan negara melalui mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pasca produksi (Trenggono, 2023). Kebijakan PIT ini mengatur zona dan kuota penangkapan ikan agar keseimbangan ekologi dan ekonomi dapat tercapai (Suherman *et al.*, 2025; Luthfia, 2023).

Meskipun kebijakan PIT membawa arah baru bagi tata kelola perikanan, implementasinya di lapangan menghadapi tantangan. Suherman & Nurani (2025) menjelaskan bahwa sejumlah hambatan muncul pada tahap transisi, terutama terkait kesiapan kelembagaan dan infrastruktur pendukung di pelabuhan pangkalan. Sebagian besar pelabuhan perikanan, termasuk di wilayah selatan Jawa, belum sepenuhnya siap dalam aspek sistem pelaporan elektronik, verifikasi data tangkapan, dan pengawasan kuota. Selain itu, kapasitas sumber daya manusia di tingkat pelaksana masih terbatas, baik dalam hal pemahaman konsep PIT, penggunaan aplikasi e-PIT, maupun tata cara perhitungan PNBP pascaproduksi.

Studi Nurlaela (2023) mengungkapkan bahwa pelabuhan berskala kecil kerap menemui kendala dalam memahami aturan teknis serta keterbatasan fasilitas pelaporan dan pengawasan. Faktor komunikasi, sarana prasarana, sikap pelaksana, dan struktur pengelola terbukti mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan (Azhar, 2025; Ghinanda *et al.*, 2024; Dhanni, 2024). Kurangnya sosialisasi dan ketimpangan akses informasi antar pelaku usaha sering kali menyebabkan perbedaan persepsi dan adaptasi terhadap kebijakan betaru (Ramadhanti, 2020).

Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tamperan di Pacitan merupakan salah satu lokasi penerapan PIT karena memiliki intensitas aktivitas penangkapan yang tinggi dan kontribusi signifikan terhadap produksi perikanan daerah. Total produksi ikan tahun 2024 di PPP Tamperan menunjukkan peningkatan, dengan nilai produksi sebesar Rp6,63 miliar, seiring dengan meningkatnya volume tangkapan dan kepatuhan pelaporan pelaku usaha. Produksi di tahun 2025 Bulan Januari sampai Agustus berpotensi mengalami penurunan hingga akhir tahun. Pelaksanaan PIT di PPP Tamperan masih perlu terus di evaluasi. Sebagaimana disebutkan oleh Suherman & Nurani (2025); Hakim & Effendi (2024); Sary *et al.* (2025) bahwa kesiapan pelaku dan efektivitas pelaksanaan kebijakan masih memerlukan evaluasi.

Pentingnya penelitian ini terletak pada belum sepenuhnya implementasi kebijakan PIT ini dilaksanakan hingga akhir tahun 2025 masih dalam masa transisi. PPP Tamperan, memiliki posisi strategis dan potensi produksi yang tinggi. Implementasi kebijakan PIT di tingkat pusat dan pelaksanaan di tingkat pelaksana memerlukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, serta bagaimana persepsi dan pengalaman pelaku perikanan berperan dalam proses tersebut. Oleh karena itu, pengkajian sejauh mana unsur komunikasi, sarana prasarana, sikap pelaksana, dan struktur pengelola mendukung keberhasilan PIT serta bagaimana keterkaitan antara persepsi dan pengalaman pelaku perikanan dapat mempengaruhi efektivitas implementasinya menjadi sangat penting.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi PIT di PPP Tamperan, terutama dari aspek komunikasi, sarana dan prasarana, sikap pelaksana, serta struktur pengelola, serta untuk mengidentifikasi hubungan antara persepsi dan pengalaman pelaku perikanan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut.

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan implementasi kebijakan PIT secara sistematis, faktual, dan akurat pada PPP Tamperan, Kabupaten Pacitan. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai persepsi, pengalaman, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan kebijakan PIT di tingkat pelaku perikanan. Menurut Sugiyono (2013), pendekatan kuantitatif deskriptif efektif digunakan untuk menjelaskan fenomena sosial secara objektif melalui pengukuran variabel penelitian dengan instrumen terstandar. Pengumpulan data dilakukan selama Januari–September 2025.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian mencakup seluruh pelaku perikanan yang terlibat langsung dalam kegiatan penangkapan dan pengelolaan hasil tangkapan di PPP Tamperan, baik dari unsur nelayan, pengelola, maupun pengawas kebijakan PIT. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling ditujukan untuk individu yang memenuhi kriteria inklusi dijadikan responden penelitian.

Populasi penelitian ini meliputi pelaku perikanan tangkap yang beraktivitas di PPP Tamperan, yang secara langsung terlibat dalam implementasi kebijakan PIT. Responden penelitian dipilih secara purposive sampling dengan kriteria: (1) aktif melakukan kegiatan penangkapan, pengawasan, atau pelayanan di PPP Tamperan minimal satu tahun terakhir; (2) terlibat langsung dalam proses implementasi kebijakan PIT, baik melalui kegiatan pelaporan hasil tangkapan, pengawasan, maupun pelayanan administrasi pelabuhan; serta. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh 33 responden, terdiri atas 13 pemilik kapal perikanan skala kecil-menengah (5-30 GT) yang beroperasi di wilayah tangkap Zona IV, 5 pengurus kapal yang bertanggung jawab terhadap pencatatan hasil tangkapan dan pengelolaan logistik melaut, 12 petugas pelabuhan

yang meliputi petugas TPI, pengukur hasil tangkapan, dan petugas administrasi perizinan, serta 3 pengawas lapangan yang bertugas melakukan pemantauan aktivitas penangkapan, pelaporan, dan kepatuhan terhadap ketentuan PIT. Komposisi responden tersebut dipilih untuk merepresentasikan seluruh aktor utama dalam rantai implementasi kebijakan PIT di PPP Tamperan, mulai dari pelaku penangkapan hingga pengelola pelabuhan.

Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder yang saling melengkapi untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai implementasi kebijakan PIT di PPP Tamperan. Data primer diperoleh melalui pengisian kuesioner dan wawancara langsung kepada responden yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan PIT. Kuesioner digunakan untuk mengukur beberapa variabel utama, yaitu komunikasi kebijakan, sarana dan prasarana, sikap pelaksana, struktur pengelola, pelaksanaan kebijakan PIT, persepsi pelaku perikanan, serta pengalaman pelaku perikanan terhadap pelaksanaan kebijakan. Wawancara mendalam dilakukan sebagai bentuk triangulasi data untuk memperkuat hasil kuesioner, dengan fokus pada aspek pemahaman responden terhadap aturan PIT, hambatan pelaksanaan di lapangan, serta bentuk dukungan yang diberikan oleh petugas pelabuhan selama proses implementasi kebijakan berlangsung.

Selain faktor teknis dan kelembagaan, persepsi dan pengalaman pelaku perikanan juga merupakan aspek penting dalam menilai keberhasilan kebijakan. Persepsi yang positif terhadap kebijakan akan mempengaruhi cara pelaku perikanan beradaptasi dan berpartisipasi dalam pelaksanaannya. Untuk mengetahui keterkaitan antara kedua aspek tersebut, analisis statistik Chi-Square digunakan dalam penelitian ini karena mampu menguji hubungan antara dua variabel kategori, yaitu persepsi dan pengalaman pelaku perikanan terhadap pelaksanaan kebijakan PIT. Pendekatan ini memberikan dasar empiris untuk menilai apakah pemahaman terhadap kebijakan berkorelasi dengan tingkat pengalaman di lapangan.

Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari berbagai dokumen dan sumber resmi, meliputi data produksi dan nilai produksi ikan tahun 2023-2025, data Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pasca produksi tahun 2023-2025, serta informasi terkait sistem pelaporan digital (e-PIT) dan dokumen pelaksanaan kebijakan yang diperoleh dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta

UPT PPP Tamperan. Data sekunder ini berfungsi untuk memberikan konteks empiris dan memperkuat interpretasi hasil analisis data primer.

Instrumen utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup dengan skala Likert lima poin, yaitu mulai dari "sangat tidak setuju" (1) hingga "sangat setuju" (5). Penyusunan kuesioner didasarkan pada model implementasi kebijakan Edward III, yang mencakup lima dimensi utama, yaitu komunikasi, sumber daya (sarana dan prasarana), disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Selain itu, untuk mengukur variabel persepsi dan pengalaman pelaku perikanan, disusun masing-masing sebanyak 25 butir pernyataan yang relevan dengan konteks pelaksanaan kebijakan PIT. Sebelum digunakan dalam pengumpulan data, kuesioner terlebih dahulu melalui uji validitas dan reliabilitas guna memastikan bahwa instrumen penelitian layak digunakan dan mampu menghasilkan data yang akurat serta konsisten.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kuantitatif. Tahapan analisis dimulai dengan uji validitas, yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana setiap item pernyataan dalam kuesioner mampu merepresentasikan variabel yang diteliti. Uji ini dilakukan menggunakan metode korelasi Pearson Product Moment, di mana suatu item dinyatakan valid apabila nilai r hitung lebih besar dari r tabel pada taraf signifikansi 0,05. Selanjutnya dilakukan uji reliabilitas untuk mengetahui tingkat konsistensi internal instrumen penelitian. Uji reliabilitas menggunakan koefisien Cronbach's Alpha, dengan kriteria bahwa nilai $\alpha > 0,60$ menunjukkan bahwa instrumen memiliki tingkat keandalan yang baik dan layak digunakan dalam pengumpulan data.

Tahapan berikutnya adalah analisis deskriptif, yang digunakan untuk menggambarkan tingkat persepsi responden terhadap setiap variabel penelitian melalui distribusi frekuensi dan persentase. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang paling berpengaruh dalam keberhasilan implementasi kebijakan PIT, seperti faktor komunikasi, sarana dan prasarana, sikap pelaksana, serta struktur pengelola. Selain itu, untuk memahami hubungan antar variabel, dilakukan uji korelasi Chi-Square dan koefisien kontingensi. Uji ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara persepsi dan pengalaman pelaku perikanan terhadap pelaksanaan kebijakan PIT di PPP Tamperan.

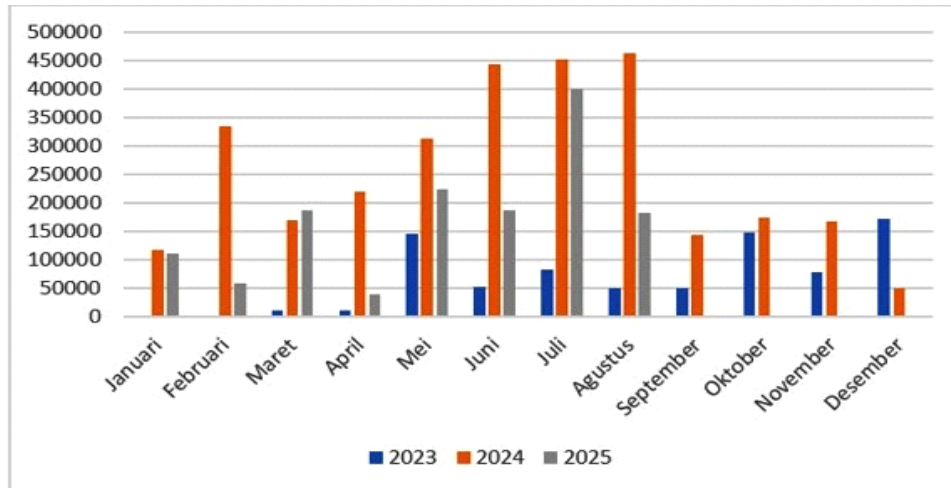
BAHASAN

Produksi PPP Tamperan

Produksi ikan yang didaratkan di PPP Tamperan selama periode 2023-2025 menunjukkan fluktuasi dari sisi volume maupun nilai ekonominya. Pada tahun 2023, total produksi tercatat sebesar 803.020 kg, kemudian meningkat signifikan pada tahun 2024 menjadi 3.052.142 kg, namun hingga Agustus 2025 kembali menurun sebesar 1.388.993 kg (Gambar 1). Peningkatan produksi tahun 2024 dipengaruhi oleh kondisi musim penangkapan yang mendukung dan peningkatan aktivitas armada nelayan yang memanfaatkan kebijakan PIT untuk memperluas jangkauan operasi. Sebaliknya, penurunan produksi pada tahun 2025 disebabkan oleh perubahan musim, berkurangnya jumlah armada penangkapan yang aktif menangkap, serta faktor teknis seperti keterbatasan bahan bakar dan sarana tangkap (Hakim & Effendi, 2024).

Pola fluktuasi tersebut menggambarkan bahwa dinamika produksi di PPP Tamperan sangat dipengaruhi oleh faktor musiman dan operasional, namun juga mencerminkan dampak awal penerapan kebijakan PIT yang mulai menata sistem penangkapan berdasarkan kuota dan zonasi. Pemerintah menetapkan zona penangkapan berdasarkan potensi sumber daya ikan, di mana PPP Tamperan berperan sebagai pelabuhan pangkalan di Zona IV yang mencakup perairan selatan Jawa. Setiap zona diberi batas kuota tangkapan agar aktivitas penangkapan sesuai dengan daya dukung sumber daya ikan. Sampai saat ini kuota masing-masing zona belum ditetapkan oleh Menteri, namun berdasarkan Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2023 tentang penangkapan ikan terukur menjelaskan bahwa Kuota Penangkapan Ikan pada Zona Penangkapan Ikan Terukur berdasarkan potensi sumber daya ikan yang tersedia dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan dengan mempertimbangkan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan.

Kebijakan PIT mewajibkan Nelayan mendaratkan hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan yang ditetapkan serta melaporkan hasil produksi melalui e-PIT sebagai dasar perhitungan PNBP. Implementasi kebijakan PIT, membuat penangkapan ikan akan menjadi lebih terukur, transparan, dan terkendali, sekaligus memperkuat fungsi pelabuhan sebagai pusat pendataan dan pengawasan serta pengelolaan perikanan berkelanjutan.

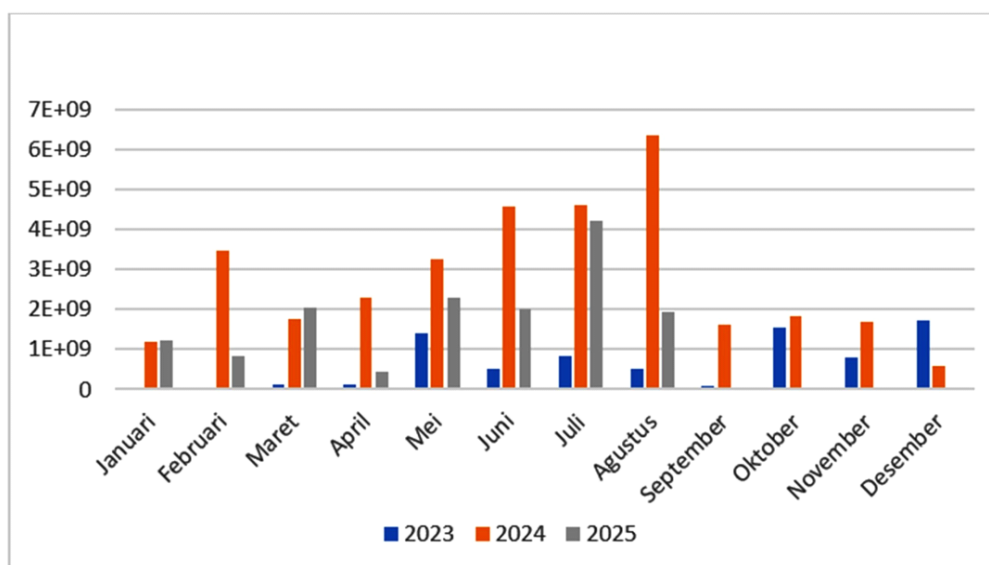


Gambar 1. Produksi di PPP Tamperan Tahun 2023-2025 (sumber: PPP Tamperan, 2025).
Figure 1. Production at PPP Tamperan in 2023-2025 (source: PPP Tamperan, 2025).

Kenaikan produksi dan nilai produksi pada Gambar 1 dan 2 di PPP Tamperan pada tahun 2024 sejalan dengan peningkatan kepatuhan pelaku perikanan dalam melaporkan hasil tangkapan melalui sistem e-PIT yang mulai diimplementasikan secara lebih luas oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan informasi KKP (2024), penerapan e-PIT memungkinkan pencatatan kegiatan penangkapan, kuota tangkapan, dan pelaporan hasil produksi secara digital dan terintegrasi dengan sistem perizinan. Data nasional menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan pelaporan kapal perikanan pada awal penerapan e-PIT, dari sekitar 55–60% pada tahun 2023 menjadi lebih dari 80% pada pertengahan 2024, terutama di pelabuhan pangkalan yang menjadi lokasi uji coba PIT (KKP, 2024; CFI Indonesia, 2024). Meskipun tidak

tersedia data persentase spesifik untuk PPP Tamperan, tren tersebut menunjukkan bahwa sistem pelaporan digital telah memperbaiki akurasi dan keterlacakan data produksi di pelabuhan ini. Hal ini menandakan bahwa kebijakan PIT memberikan dampak terhadap perbaikan data. kebijakan tersebut antara lain mewajibkan pelaku usaha dan nakhoda kapal penangkapan ikan melaporkan hasil tangkapan (produksi ikan) melalui aplikasi E_PIT bagi setiap kapal ijin pusat yang melakukan penangkapan ikan di zona penangkapan.

Fluktuasi nilai produksi ini menunjukkan adanya sensitivitas ekonomi terhadap perubahan musim penangkapan, harga ikan di pasar, serta efisiensi rantai pasok di pelabuhan. Menurut Yaskun & Sugiarto



Gambar 2. Nilai Produksi di PPP Tamperan Tahun 2023-2025 (sumber: PPP Tamperan, 2025).
Figure 2. Production Value at PPP Tamperan in 2023-2025 (source: PPP Tamperan, 2025).

(2017), peningkatan nilai produksi berkontribusi langsung terhadap kesejahteraan nelayan dan pertumbuhan ekonomi pesisir, karena hasil tangkapan yang tinggi biasanya diikuti oleh peningkatan aktivitas pelelangan dan distribusi ikan ke pasar regional.

Fluktuasi produksi di PPP Tamperan dengan demikian tidak hanya mencerminkan perubahan ekologis akibat musim, tetapi juga menjadi indikator kesiapan pelaku perikanan dalam menghadapi sistem pengelolaan baru yang lebih terukur dan berbasis kuota. Oleh karena itu, keberlanjutan peningkatan produksi di masa mendatang perlu ditopang oleh penguatan sarana pendukung, monitoring musim penangkapan yang adaptif, serta pendampingan intensif bagi pelaku usaha agar kebijakan PIT dapat memberikan manfaat optimal bagi nelayan sekaligus menjaga kelestarian sumber daya ikan.

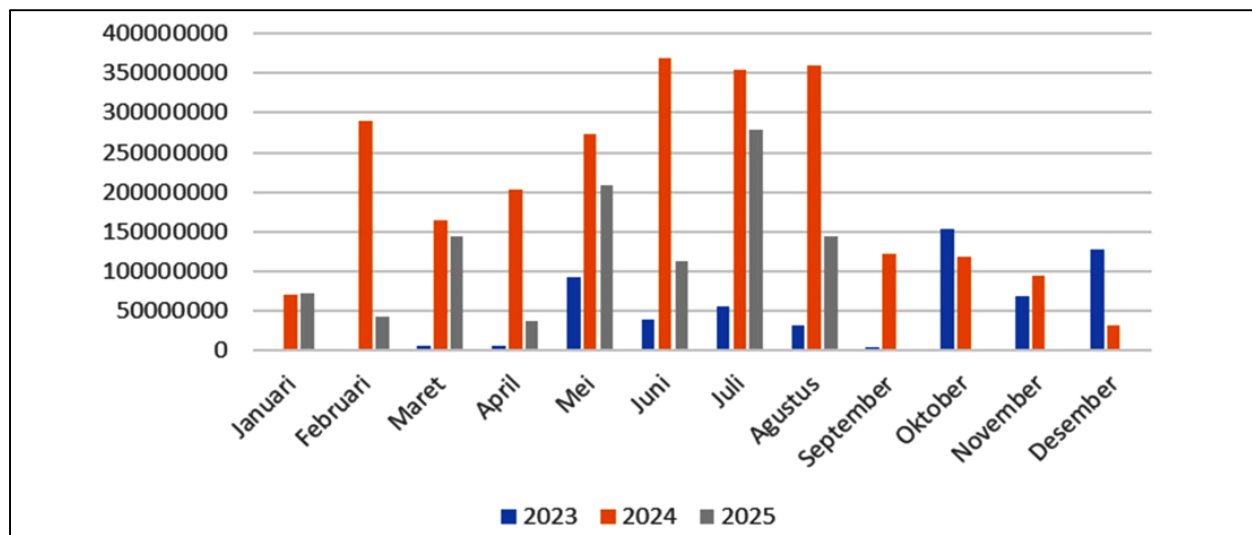
Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari subsektor perikanan tangkap di PPP Tamperan selama periode 2023-2025 disajikan pada Gambar 3, total PNBP pasca produksi tercatat sebesar Rp594,9 juta pada tahun 2023, meningkat pada 2024 menjadi Rp2,45 miliar, sedangkan pada tahun 2025 (sampai dengan bulan Agustus) sebesar Rp1,12 miliar. Puncak penerimaan bulanan terjadi pada Februari 2024 sebesar Rp289,85 juta, sedangkan nilai terendah dicapai pada Desember 2024 sebesar Rp31,70 juta. Pola ini menunjukkan bahwa penerimaan negara di sektor perikanan sangat tergantung tingkat kepatuhan

pelaku usaha terhadap mekanisme pungutan pasca produksi yang diberlakukan dalam kebijakan PIT.

Kenaikan signifikan pada tahun 2024 mencerminkan efektivitas awal penerapan sistem pelaporan digital e-PIT, yang menggantikan mekanisme pungutan praproduksi menjadi pascaproduksi berbasis hasil tangkapan aktual. Implementasi model ini menjadikan pencatatan lebih akurat terhadap volume tangkapan dan nilai ekonomi hasil perikanan. Menurut Sary *et al.* (2025), sistem pungutan pascaproduksi mendorong transparansi, akuntabilitas, dan keadilan fiskal, karena pungutan negara dihitung berdasarkan hasil riil, bukan estimasi. Temuan ini juga memperlihatkan bahwa peningkatan volume pelaporan Laporan Perhitungan Mandiri (LPM) dari 95 laporan pada 2023 menjadi 277 laporan pada 2024 berperan langsung dalam meningkatkan nilai PNBP.

Kebijakan PIT yang mengarah pada pencatatan hasil tangkapan yang lebih akurat (melalui sistem e-PIT) memungkinkan mekanisme PNBP lebih efektif, volume tangkapan yang tercatat meningkat, sehingga potensi PNBP meningkat. Dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui pelaporan pasca-produksi, maka UPT PPP Tamperan memperoleh kegiatan seperti pemeliharaan pelabuhan, pengembangan fasilitas nelayan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan. lebih lanjut disebutkan oleh CFI Indonesia (2024), disebutkan, mekanisme DBH dari sektor perikanan memberikan insentif ke daerah penghasil: sesuai dengan ketentuan



Gambar 3. Nilai PNBP Pasca Produksi di PPP Tamperan 2023 - 2025 (sumber: PPP Tamperan, 2025).

Figure 3. Non-state tax revenue after landing at PPP Tamperan 2023 - 2025 (source: PPP Tamperan, 2025).

UU No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sekitar 80 % dari penerimaan PNBP SDA perikanan diperuntukkan ke daerah melalui program DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus).

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan PIT

Keberhasilan implementasi kebijakan PIT di PPP Tamperan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang menentukan efektivitas pelaksanaannya di lapangan. Mengacu pada model implementasi kebijakan Edwards III, terdapat lima faktor utama yang berperan, yaitu komunikasi, sarana dan prasarana, sikap pelaksana, serta struktur pengelola. Kelima faktor ini menjadi dasar analisis dalam menilai tingkat keberhasilan penerapan kebijakan di wilayah penelitian ditambah dengan faktor pelaksana kebijakan PIT. Selain itu, penelitian ini juga menambahkan variabel pelaksanaan kebijakan serta persepsi dan pengalaman pelaku perikanan terhadap PIT sebagai variabel empiris yang diuji melalui analisis korelasi. Pendekatan ini memberikan gambaran hasil survei terhadap 33 responden yang terdiri atas pemilik kapal, pengurus kapal, petugas pelabuhan, dan pengawas lapangan menunjukkan variasi tanggapan terhadap kelima faktor yaitu komunikasi, sarana dan prasarana, sikap pelaksana, struktur pengelola dan pelaksana kebijakan PIT. Secara umum, mayoritas responden memberikan penilaian pada kategori setuju dan sangat setuju, yang mencerminkan adanya penerimaan dan dukungan positif terhadap implementasi kebijakan PIT di PPP Tamperan. Distribusi persepsi responden terhadap masing-masing faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan kebijakan PIT dapat dilihat pada Gambar 4, yang menyajikan perbandingan tingkat kesetujuan responden terhadap setiap aspek implementasi kebijakan.

Komunikasi

Komunikasi menjadi elemen mendasar dalam memastikan kebijakan dapat dipahami dan dijalankan secara seragam oleh seluruh pelaku di lapangan. Berdasarkan hasil survei, sebesar 46% responden menyatakan sangat setuju dan 33% setuju bahwa komunikasi antara pengelola pelabuhan dan nelayan berjalan dengan baik, sementara 21% bersikap netral

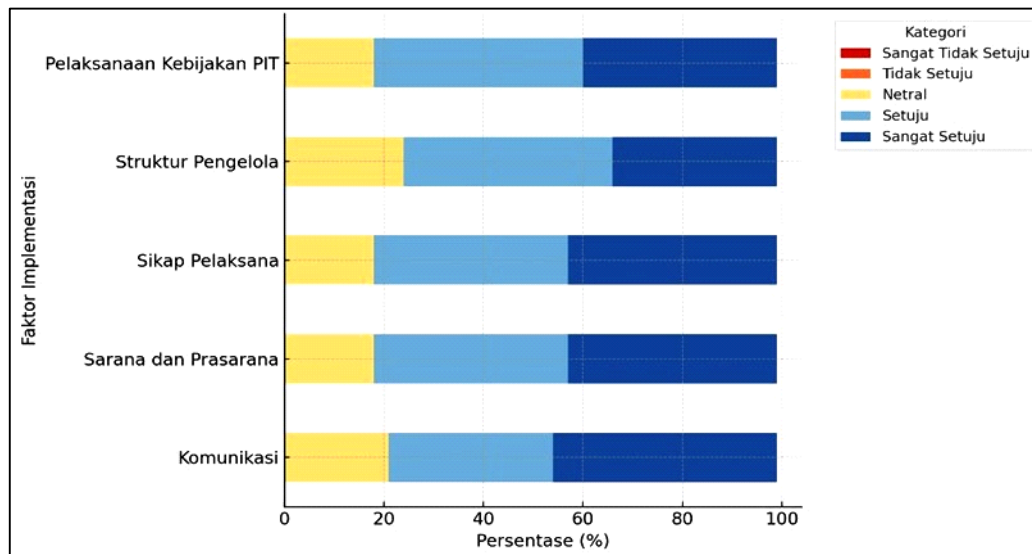
(Gambar 4). Komunikasi yang sudah dilakukan oleh pengelola pelabuhan ada 2 jenis, yaitu sosialisasi secara langsung (konsultasi publik dan forum sosialisasi) dan sosialisasi tidak langsung (media massa, media sosial dan media luar ruangan). Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku perikanan telah menerima informasi terkait kebijakan PIT secara jelas, meskipun masih terdapat sebagian kecil yang belum memperoleh sosialisasi menyeluruh.

Menurut Azhar (2025), efektivitas komunikasi kebijakan bergantung pada kejelasan pesan, konsistensi penyampaian, dan kredibilitas sumber informasi. Meskipun di PPP Tamperan komunikasi antara nelayan dan petugas pelabuhan tergolong baik, masih ditemukan kesenjangan informasi (communication gap) pada kelompok nelayan yang beroperasi di zona tangkap terpencil. Kurangnya intensitas sosialisasi formal dari pengelola pelabuhan menyebabkan pemahaman terhadap aturan zona penangkapan ikan dan pelaporan hasil tangkapan belum sepenuhnya merata. Oleh karena itu, keberhasilan komunikasi kebijakan memerlukan strategi komunikasi dua arah, dengan pendekatan partisipatif agar pesan kebijakan dapat diterima, dipahami, dan diimplementasikan secara konsisten oleh semua pihak.

Sarana dan Pra Sarana

Ketersediaan sarana dan prasarana menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan PIT. Hasil survei menunjukkan 43% responden sangat setuju dan 39% setuju bahwa fasilitas di PPP Tamperan sudah memadai, sedangkan 18% menyatakan netral (Gambar 4). Hal ini menunjukkan bahwa secara umum infrastruktur pelabuhan telah mendukung kegiatan operasional, namun masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu dibenahi.

Menurut Ghinanda *et al.* (2024), sarana pelabuhan seperti tempat pelelangan ikan (TPI), fasilitas penyimpanan hasil tangkapan, sistem pendingin (cold storage), serta peralatan digitalisasi pelaporan menjadi komponen penting dalam mendukung kebijakan PIT. Masih ditemukan keterbatasan pada beberapa fasilitas, seperti tidak tersedianya pabrik es, timbangan digital, serta kebersihan area bongkar muat yang belum optimal. Kekurangan ini dapat



Gambar 4. Distribusi Tanggapan Responden Terhadap Lima Faktor Utama yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan PIT di PPP Tamperan (sumber: data diolah, 2025).

Figure 4. Distribution of Respondent Responses to the Five Main Factors Affecting the Implementation of the PIT Policy at PPP Tamperan (source: processed data, 2025).

memperlambat proses pelaporan hasil tangkapan dan Mempengaruhi akurasi data produksi. Oleh karena itu, peningkatan sarana fisik dan sistem digital di pelabuhan menjadi kebutuhan strategis agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efisien dan terukur.

Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana kebijakan mencerminkan komitmen dan penerimaan terhadap kebijakan yang diimplementasikan. Berdasarkan hasil penelitian yang disajikan pada Gambar 4, 43% responden sangat setuju dan 39% setuju bahwa petugas pelabuhan dan nelayan memiliki sikap positif terhadap kebijakan PIT. Hanya 18% yang bersikap netral, dan tidak ada responden yang menyatakan tidak setuju. Hasil ini mengindikasikan bahwa pelaksana di lapangan memiliki tingkat penerimaan yang tinggi terhadap kebijakan ini.

Menurut Dhanni (2024), sikap positif pelaksana kebijakan sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman terhadap manfaat kebijakan, kejelasan aturan, serta dukungan dari pimpinan dan rekan kerja. Pelaksana PPP Tamperan, menunjukkan sikap positif terlihat dari kesediaan petugas pelabuhan untuk membantu nelayan dalam proses pelaporan hasil tangkapan, serta kepatuhan nelayan terhadap aturan zonasi dan pendaratan hasil tangkapan ikan. Sikap ini menjadi modal sosial penting dalam menjaga keberlanjutan

pelaksanaan kebijakan PIT, meskipun masih diperlukan peningkatan kapasitas pelaksana agar mereka mampu beradaptasi dengan sistem digital dan regulasi yang terus diperbarui.

Faktor Struktur Pengelola

Struktur organisasi dan tata kelola pelabuhan memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 43% responden setuju, 33% sangat setuju, dan 24% netral (Gambar 4) terhadap kejelasan struktur pengelola di PPP Tamperan. Temuan ini menggambarkan bahwa struktur birokrasi pelabuhan telah berjalan cukup baik, namun masih terdapat beberapa kendala koordinasi dan keterbatasan sumber daya manusia di lapangan. Menurut Nurlaela (2023), struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas yang tepat dapat meminimalkan konflik kewenangan antar unit pelaksana. Alur kerja dan tanggung jawab di PPP Tamperan telah diketahui oleh sebagian besar pelaku, masih ditemukan tumpang tindih tugas antar petugas serta minimnya tenaga administrasi dan pengawasan. Selain itu, rapat koordinasi antar unit belum dilakukan secara rutin, terutama saat musim puncak penangkapan ikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan struktur manajemen dan komunikasi internal perlu dilakukan agar kebijakan PIT dapat diterapkan secara konsisten dan responsif terhadap dinamika di lapangan.

Pelaksana Kebijakan PIT

Pelaksana kebijakan memiliki peran sentral dalam menentukan keberhasilan implementasi PIT di PPP Tamperan. Berdasarkan hasil penelitian (Gambar 4), mayoritas responden menunjukkan pandangan positif terhadap kinerja pelaksana kebijakan, dengan 43% responden menyatakan setuju dan 39% sangat setuju, sedangkan 18% menyatakan netral, serta tidak ada yang menyatakan tidak setuju. Hasil ini mengindikasikan bahwa secara umum pelaku perikanan menilai proses pelaksanaan kebijakan sudah berjalan baik, meskipun masih terdapat sebagian kecil pelaku yang menilai implementasi di lapangan belum sepenuhnya optimal.

Kinerja pelaksana di PPP Tamperan juga ditunjang oleh komitmen petugas pelabuhan, pengawas lapangan, dan aparat pengelola dalam menjaga keteraturan proses penangkapan dan pelaporan. Dukungan mereka terlihat dari upaya menyediakan layanan konsultasi bagi nelayan, membantu pengisian laporan hasil tangkapan, hingga memastikan data yang masuk ke sistem e-PIT telah diverifikasi. Meskipun demikian, wawancara lapangan menunjukkan bahwa beban kerja pelaksana masih cukup tinggi, terutama karena jumlah petugas belum sebanding dengan intensitas aktivitas pelabuhan dan banyaknya armada yang harus diawasi. Kondisi ini menimbulkan tantangan dalam menjaga konsistensi pengawasan dan ketepatan waktu pelaporan, khususnya pada musim puncak penangkapan.

Selain faktor teknis, keberhasilan pelaksanaan kebijakan juga sangat dipengaruhi oleh sikap profesionalisme dan tingkat pemahaman pelaksana terhadap substansi kebijakan. Pelaksana yang memahami esensi PIT sebagai upaya menjaga keberlanjutan sumber daya ikan cenderung lebih mampu menjalankan tugas dengan pendekatan edukatif dan persuasif, bukan sekadar administratif. Pendekatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi nelayan, mengurangi resistensi terhadap kebijakan baru, serta memperkuat hubungan kolaboratif antara pelaksana dan pelaku perikanan. Hal ini sejalan dengan pandangan Dhanni (2024) yang menyatakan bahwa pelaksana kebijakan yang memiliki komitmen tinggi dan memahami manfaat kebijakan akan berkontribusi pada peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang diterapkan.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya beberapa kendala yang perlu diperhatikan dalam konteks pelaksanaan kebijakan PIT di PPP

Tamperan, antara lain : keterbatasan jumlah tenaga pengawas lapangan, minimnya pelatihan teknis penggunaan sistem digital, serta belum optimalnya koordinasi antar unit pelaksana. Hambatan tersebut dapat mengurangi efektivitas pengawasan dan validitas data hasil tangkapan yang dilaporkan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas pelaksana melalui pelatihan rutin, dukungan infrastruktur teknologi, serta penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang lebih terintegrasi.

Persepsi dan Pengalaman Pelaku Perikanan

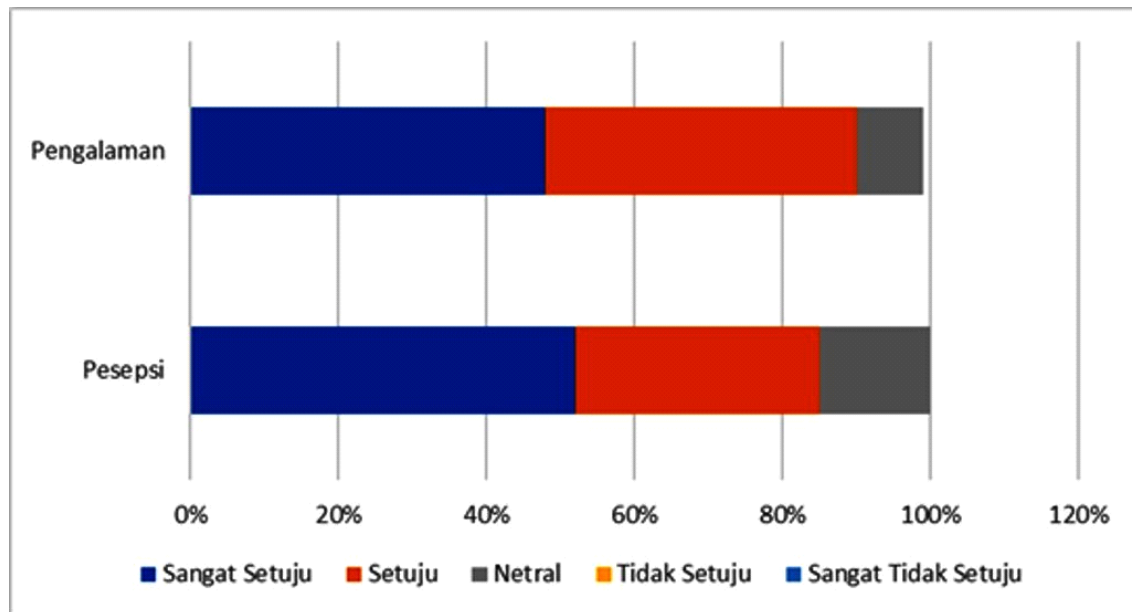
Berdasarkan Gambar 5 persepsi pelaku perikanan di PPP Tamperan menunjukkan bahwa mayoritas responden berada pada kategori sangat setuju sebesar 52%, setuju sebesar 33%, dan netral sebesar 15%, tanpa ada responden yang menyatakan tidak setuju maupun sangat tidak setuju. Hasil ini mencerminkan penerimaan yang tinggi dari nelayan terhadap kebijakan PIT.

Hasil survei mengenai persepsi dan pengalaman pelaku perikanan tersebut memberikan gambaran awal mengenai tingkat penerimaan dan keterlibatan nelayan terhadap pelaksanaan kebijakan PIT di PPP Tamperan. Temuan bahwa sebagian besar responden berada pada kategori sangat setuju dan memiliki tingkat pengalaman yang tinggi menunjukkan adanya kecenderungan positif terhadap implementasi kebijakan di lapangan. Hal ini sejalan dengan temuan dari Etikasari (2018) dan Kharis et al. (2024), bahwa kategori sangat setuju menggambarkan pandangan positif yang kuat serta penerimaan penuh terhadap suatu kebijakan dan pengalaman sangat tinggi menggambarkan kondisi ketika individu merasakan manfaat langsung dari suatu kebijakan atau program, sehingga menumbuhkan keyakinan positif yang kuat terhadap aturan yang berlaku.

Hal ini terlihat pada nelayan di PPP Tamperan yang sudah mulai menyesuaikan diri dengan mekanisme kebijakan, termasuk pemanfaatan sarana digital dan kepatuhan terhadap aturan zonasi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan PIT telah memberi dampak nyata yang dirasakan langsung oleh pelaku perikanan.

Analisis Kelayakan Instrumen dan Hubungan Variabel Persepsi–Pengalaman

Untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini memiliki tingkat keandalan dan ketepatan yang tinggi, dilakukan analisis terhadap kelayakan instrumen penelitian dan hubungan antara



Gambar 5. Tingkat Persepsi Pelaku Perikanan terhadap Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (sumber: data diolah, 2025).

Figure 5. Perception Level of Fisheries Actors towards the Measured Fishing Policy (source: processed data, 2025).

variabel persepsi dan pengalaman pelaku perikanan terhadap kebijakan PIT di PPP Tamperan. Analisis kelayakan meliputi uji validitas dan uji reliabilitas terhadap instrumen kuesioner yang digunakan, sedangkan analisis hubungan antarvariabel dilakukan melalui uji Chi-Square dan koefisien kontingensi.

Hasil uji validitas persepsi menunjukkan bahwa 25 instrumen kuesioner dinyatakan valid karena nilai r hitung $> r$ tabel. Dengan jumlah sampel (N) sebanyak 33, nilai r tabel diketahui sebesar 0,344 pada tingkat kepercayaan 0,05. Hal ini berarti setiap butir pertanyaan mampu mengukur variabel yang diteliti secara tepat. Menurut Sugiyono (2013), uji validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti.

Hasil uji reliabilitas pada variabel persepsi menunjukkan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,966, melampaui batas minimum 0,60. Nilai ini diperoleh berdasarkan perbandingan varian skor total 25 instrumen dengan varian skor per instrumen. Dengan nilai r tabel sebesar 0,344, hasil uji reliabilitas variabel persepsi ($0,966 > 0,344$) menegaskan bahwa 25 instrumen yang digunakan reliabel.

Hasil uji validitas dari 25 instrumen kuesioner variabel pengalaman dinyatakan valid karena nilai r hitung lebih besar dari r tabel ($0,344$; $N=33$; $\alpha=0,05$).

Hal ini menunjukkan bahwa setiap butir pertanyaan mampu mengukur pengalaman pelaku perikanan terkait implementasi kebijakan PIT secara tepat.

Hasil uji reliabilitas variabel pengalaman menunjukkan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,965. Nilai ini jauh melampaui batas minimum 0,60 sebagaimana dikemukakan Taherdoost (2018), sehingga instrumen dinyatakan reliabel atau konsisten dalam mengukur. Reliabilitas tinggi pada 25 butir pertanyaan menandakan bahwa instrumen mampu memberikan hasil yang stabil meskipun digunakan berulang kali.

Distribusi frekuensi pelaku perikanan di PPP Tamperan menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara persepsi dengan pengalaman dalam implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur. Responden pada kategori persepsi netral tercatat sebanyak 6 orang, kategori setuju sebanyak 13 orang, dan kategori sangat setuju sebanyak 14 orang. Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas responden berada pada tingkat setuju hingga sangat setuju terhadap kebijakan yang dilaksanakan.

Menurut Nababan & Wiyono (2017), korelasi digunakan untuk mengetahui sejauh mana dua variabel saling berhubungan dalam perubahannya. Analisis korelasi dengan Chi Square mengukur bagaimana variabel persepsi dan pengalaman memiliki keterkaitan satu sama lain.

Hasil uji Chi-Square pada Tabel 1 menunjukkan nilai Pearson Chi-Square sebesar 57,433 dengan tingkat signifikansi $p < 0,001$, yang berarti terdapat hubungan yang sangat signifikan antara persepsi dan pengalaman pelaku perikanan terhadap pelaksanaan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) di PPP Tamperan. Sebelum interpretasi dilakukan, uji asumsi Chi-Square telah diperiksa dan menunjukkan bahwa seluruh frekuensi harapan (expected count) memenuhi kriteria kelayakan, dengan tidak lebih dari 20% sel memiliki nilai expected count kurang dari 5 dan tidak terdapat sel dengan nilai 0, sehingga hasil uji dapat dinyatakan valid. Nilai ini menolak hipotesis nol (H_0) yang menyatakan tidak ada hubungan antara kedua variabel, dan mendukung hipotesis alternatif (H_1) bahwa semakin positif persepsi pelaku, semakin tinggi pula pengalaman positif yang mereka rasakan dalam implementasi kebijakan PIT.

Analisis lanjutan menggunakan koefisien kontingensi juga menunjukkan hubungan yang kuat antara kedua variabel, menandakan bahwa persepsi yang terbentuk melalui pemahaman dan komunikasi kebijakan berperan penting dalam membentuk pengalaman nyata pelaku di lapangan.

Hasil ini menggambarkan bahwa pelaku perikanan di PPP Tamperan tidak hanya memahami substansi kebijakan PIT, tetapi juga telah mengalami manfaatnya secara langsung, baik dari sisi efisiensi

pelaporan hasil tangkapan maupun peningkatan keteraturan aktivitas penangkapan. Semakin baik persepsi pelaku terhadap kebijakan, semakin tinggi pula tingkat keterlibatan dan kepatuhan mereka dalam menjalankan sistem penangkapan ikan yang terukur dan berkelanjutan.

Temuan ini menegaskan bahwa persepsi dan pengalaman merupakan dua komponen yang saling memperkuat dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan PIT. Persepsi positif mendorong pelaku perikanan untuk beradaptasi dan berpartisipasi aktif, sedangkan pengalaman positif memperkuat keyakinan mereka terhadap efektivitas kebijakan. Kondisi ini menciptakan feedback loop yang konstruktif, di mana pemahaman yang baik terhadap kebijakan menghasilkan pengalaman yang baik pula, dan sebaliknya.

Secara praktis, hasil ini menunjukkan pentingnya pendekatan komunikasi dan pendampingan yang berkelanjutan dari pemerintah serta pengelola pelabuhan untuk menjaga konsistensi persepsi positif di kalangan pelaku perikanan. Selain itu, monitoring rutin terhadap persepsi dan pengalaman pelaku dapat menjadi indikator penting dalam mengevaluasi keberlanjutan kebijakan PIT ke depan. Kelayakan instrumen yang kuat dan hubungan yang signifikan antar variabel menunjukkan bahwa penelitian ini

Table 1. Hasil Uji Chi-Square
Table 1. Chi-Square Test Results

Chi-Square Test			
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	57.433 ^a	4	<.001
Likelihood Ratio	56.629	4	<.001
Linear-by-Linear Association	28.853	1	<.001
N of Valid Cases	33		

memberikan dasar empiris bahwa keberhasilan implementasi PIT di PPP Tamperan tidak hanya ditentukan oleh regulasi dan infrastruktur, tetapi juga oleh keselarasan antara pemahaman, pengalaman, dan keterlibatan para pelaku di lapangan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) merupakan langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan melalui pengaturan zona penangkapan,

penetapan pelabuhan pangkalan, serta penyesuaian jumlah tangkapan dengan potensi sumber daya ikan. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tamperan ditetapkan sebagai salah satu lokasi pelaksanaan kebijakan ini karena aktivitas penangkapan dan fasilitas yang memadai, keberadaan pengelola serta perannya yang strategis dalam mendukung tata kelola perikanan di wilayah tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan PIT di PPP Tamperan dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu komunikasi, sarana dan prasarana, sikap pelaksana, struktur pengelola dan pelaksana

kebijakan PIT. Kelima faktor tersebut memperoleh penilaian dalam kategori setuju hingga sangat setuju, menandakan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat bergantung pada kejelasan komunikasi antar pihak terkait, ketersediaan fasilitas yang memadai, sikap positif dari pelaksana kebijakan, serta sistem pengelolaan yang terstruktur dengan baik.

Rekomendasi

Persepsi pelaku perikanan terhadap kebijakan PIT menunjukkan kecenderungan positif, dengan sebagian besar responden menyatakan setuju hingga sangat setuju terhadap manfaat dan tujuan kebijakan, meskipun masih ditemui kendala berupa keterbatasan fasilitas dan pemahaman teknis. Pengalaman pelaku perikanan berada pada kategori tinggi hingga sangat tinggi, menandakan kemampuan adaptasi yang baik dalam menjalankan aturan PIT. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi PIT di PPP Tamperan tidak hanya bergantung pada peran pelaksana kebijakan melalui komunikasi yang jelas, ketersediaan sarana prasarana, sikap pelaksana yang responsif, dan struktur pengelola yang terorganisasi, tetapi juga pada tingkat penerimaan, pemahaman, serta pengalaman nelayan dalam mengikuti ketentuan yang ditetapkan. Keterpaduan antara kesiapan pelaksana dan partisipasi pelaku menjadi faktor utama yang memperkuat efektivitas dan konsistensi pelaksanaan kebijakan PIT di lapangan.

Hasil uji Chi-Square menunjukkan adanya hubungan signifikan antara persepsi dan pengalaman pelaku perikanan terhadap kebijakan PIT. Hubungan tersebut menggambarkan bahwa persepsi yang lebih positif membuat nelayan merasakan proses pelaksanaan kebijakan menjadi lebih mudah dijalani berdasarkan pengalaman mereka selama mengikuti ketentuan PIT. Pengalaman dalam penelitian ini diartikan sebagai tingkat keterlibatan nelayan dengan kebijakan, yang meliputi kepatuhan terhadap zonasi, penggunaan sarana pelaporan, serta kemampuan beradaptasi dengan prosedur penangkapan terukur. Keberhasilan implementasi PIT di PPP Tamperan dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sarana prasarana, sikap pelaksana, dan struktur pengelola, sekaligus diperkuat oleh persepsi positif serta pengalaman adaptif para pelaku perikanan.

PERSANTUNAN

Penulis menyampaikan terima kasih kepada UPT PPP Tamperan beserta seluruh petugas lapangan yang telah memberikan dukungan dan kemudahan selama proses pengumpulan data. Ucapan terima

kasih juga ditujukan kepada para nelayan, pemilik kapal, pengurus kapal, serta pengawas perikanan yang telah bersedia menjadi responden dan berbagi informasi serta pengalaman mereka terkait pelaksanaan kebijakan PIT. Penghargaan yang sebesar-besarnya juga disampaikan kepada mitra bestari yang telah memberikan masukan, koreksi, dan saran konstruktif sehingga artikel ini dapat tersusun dengan lebih baik dan bernilai ilmiah.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar, A. W. (2025). Pengaruh komunikasi yang dimediasi partisipasi masyarakat terhadap implementasi kebijakan publik. *Journal of Education and Development*, 13(1), 655–664. <https://doi.org/10.37081/ed.v13i1.7279>.
- CFI Indonesia. (2024). *CFI Indonesia fasilitasi sosialisasi dan analisis data logbook penangkapan ikan*. Coastal Fisheries Initiative Indonesia.
- Dhanni, T. R. (2024). Implementasi kebijakan perikanan tangkap dalam mendukung kesejahteraan nelayan di Teluk Bakau tahun 2023. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 10(2), 69–77. <https://doi.org/10.25299/wedana.2024.13908>.
- Etikasari, N. W. (2018). Persepsi mahasiswa Program Studi S1 PPKn Universitas Negeri Surabaya terhadap wacana intoleransi di media sosial. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 6(1), 1–10. <https://doi.org/10.26740/kmkn.v6n01.p%25p>.
- FAO. (2022). *The State of World Fisheries and Aquaculture 2022*. FAO.
- FAO. (2024). *The State of World Fisheries and Aquaculture 2024*. FAO.
- Ghinanda, S. N., Amanda, D., & Jaya, J. (2024). Implementasi program penyediaan sarana prasarana pelabuhan perikanan dalam mendukung peningkatan hasil produksi masyarakat nelayan: Studi kasus Pelabuhan Perikanan Barek Motor di Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. *Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan*, 13(1), 312–323.
- Hakim, R. R., & Effendi, I. (2024). Evaluasi produksi perikanan budidaya di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. *JAGO TOLIS: Jurnal Agrokompleks Tolis*, 4(3), 193–200. <https://doi.org/10.56630/jago.v4i3.631>.

- KKP-Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2023). *Peraturan-peraturan pelaksanaan terkait Penangkapan Ikan Terukur (Permen KKP)*. JDIH KKP.
- KKP-Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2024). *Manual Book e-PIT versi Web v1*. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.
- KKP-Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2024). *Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan 2024*.
- Kharis, S. A. A., Arisanty, M., & Zili, A. H. A. (2024). Pengalaman dan perspektif pendidik terhadap penggunaan ChatGPT dalam pengajaran. *Jurnal Pendidikan*, 33(1), 515–524. <https://doi.org/10.32585/jp.v33i1.5004>.
- Luthfia, S. S. (2023). Mengupas tata kelola perikanan nasional melalui PP No. 11 Tahun 2023 tentang penangkapan ikan terukur demi mewujudkan blue economy. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 12(3). <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v12i3.1374>.
- Miñarro, S., Forero, G. N., Reuter, H., & Putten, I. E. (2016). The role of patron–client relations on fishing behaviour and market interactions. *Marine Policy*, 69, 73–83. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2016.04.006>
- Nababan, B., & Wiyono, E. S. (2017). Persepsi dan kepatuhan nelayan Tanjungbalai Asahan Sumatera Utara dalam mendukung perikanan tangkap yang berkelanjutan. *Marine Fisheries: Journal of Marine Fisheries Technology and Management*, 8(2), 163–174. <https://doi.org/10.29244/jmf.8.2.163-174>
- Nurlaela, E. (2023). Penangkapan ikan terukur: Tantangan dan penerapan. Dalam *Pengelolaan sumber daya perikanan laut berkelanjutan* (hlm. 267–314). BRIN Press.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur*. Jakarta.
- Pet-Soede, L., & Erdmann, M. V. (1998). *Live reef food fish industry studies (Spermonde case)*.
- Ramadhanti, M. H. (2020). *Analisis tingkat pemanfaatan fasilitas pelabuhan di Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan Pacitan, Jawa Timur* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan* (diubah dengan UU No. 45/2009). Jakarta.
- Sary, Z. A., Ulupui, I., & Pahala, I. (2025). Governance and optimization of non-tax state revenues from the utilization of fishery resources in Indonesia. *Journal of Social Research*, 4(6), 1109–1116. <https://doi.org/10.55324/josr.v4i6.2575>.
- Sugiyono, S. (2013). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suherman, A., Hernuryadin, Y., Suadela, P., Furkon, U. A., & Amboro, T. (2025). Transformation of Indonesian Capture Fisheries Governance: A Review and Prospects. *Marine Policy*, 174, 106619. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2025.106619>
- Suherman, A., Huda, H. N., Timilsina, R. R., Hernuryadin, Y., Untoro, F., Amboro, R. T., & Koirala, P. (2025). Scaling digital fisheries management: The role of e-PIT in enhancing data accuracy and operational efficiency. *Scientific Journal of Fisheries & Marine (Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan)*, 17(2). <https://doi.org/10.20473/jipk.v17i2.69393>
- Suherman, A., & Nurani, T. W. (Eds.). (2025). *Enabling factor: Perikanan tangkap berkelanjutan*. Untirta Press.
- Taherdoost, H. (2016). Validity and reliability of the research instrument: How to test the validity of a questionnaire/survey in research. *International Journal of Academic Research in Management (IJARM)*, 5(3), 28–36. DOI: 10.2139/ssrn.3205040
- Trenggono, S. W. (2023). Penangkapan ikan terukur berbasis kuota untuk keberlanjutan sumber daya perikanan di Indonesia. *Jurnal Kelautan dan Perikanan Terapan (JKPT)*, 1, 1–8. <http://dx.doi.org/10.15578/jkpt.v1i0.12057>.
- Utami, Y. (2023). Uji validitas dan uji reliabilitas instrumen penilaian kinerja dosen. *Jurnal Sains dan Teknologi*, 4(2), 21–24. <https://doi.org/10.55338/saintek.v4i2.730>

- Widagdo, A. (2019). Combating IUU Fishing in Indonesia: MCS and Legal Framework. *AACL Bioflux*.
- Wiyono, E. S. (2018). Abundance, fishing season, and management strategy for blue swimming crab (*Portunus pelagicus*) in Pangkajene Kepulauan, South Sulawesi, Indonesia. *Tropical Life Sciences Research*, 29(1), 1–10.
- Yaskun, M., & Sugiarto, E. (2017). Potensi hasil perikanan laut terhadap kesejahteraan para nelayan dan masyarakat di Kabupaten Lamongan. *Jurnal Studi Manajemen dan Bisnis*, 4(1), 257–264. <https://doi.org/10.21107/jsmb.v4i1.3225>.